

**ASKAR PERANG SABIL (APS) : STUDI POLITIK DAN
MILITER RELIGIUS MASA PERANG KEMERDEKAAN DI
YOGYAKARTA TAHUN 1945-1949**

JURNAL

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta
untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Sastra



Oleh:
Elsa Nurul Fatimah
NIM 13407141008

**PROGRAM STUDI ILMU SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2017**

**ASKAR PERANG SABIL (APS) : STUDI POLITIK DAN MILITER
RELIGIUS MASA PERANG KEMERDEKAAN di YOGYAKARTA
TAHUN 1945-1949**

**Oleh: Elsa Nurul Fatimah
NIM 13407141008**

Abstrak

Peristiwa Perang Kemerdekaan periode 1945-1949 merupakan hal bersejarah bagi seluruh bangsa Indonesia. Yogyakarta yang pada saat itu menjadi ibukota negara mengalami dampak akibat adanya berbagai macam ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri sendiri. Banyak pejuang yang terlibat dalam mempertahankan kemerdekaan di Yogyakarta. Salah satunya adalah Askar Perang Sabil (APS) yang merupakan organisasi semi militer yang didirikan oleh para ulama yang bertujuan untuk membantu TNI dalam menghadapi pasukan Belanda. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis gerakan APS, peranannya dalam berbagai pertempuran dan mengkaji pengaruh politik Islam terhadap terbentuknya APS serta peranannya sebagai kekuatan militer religius.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah kritis yang proses pengerjaannya melibatkan tahapan tertentu menurut pedoman disiplin sejarah. Pertama, heuristik merupakan kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data sejarah yang relevan. Kedua, kritik sumber merupakan tahap untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas sumber sejarah yang diperoleh. Ketiga, interpretasi yaitu penafsiran fakta sejarah atau memberikan pandangan teoritis terhadap suatu peristiwa. Keempat, historiografi yakni tahap terakhir dari kegiatan penelitian sejarah merupakan penyajian hasil penelitian dalam bentuk penulisan sejarah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Askar Perang Sabil (APS) merupakan sebuah organisasi semi militer Islam yang dibentuk untuk melakukan perlawanan terhadap bangsa Belanda dan juga kelompok lainnya yang dianggap membahayakan eksistensi negara. Terbentuknya APS ini tidak terlepas dari pengaruh kondisi sosial dan politik di Yogyakarta khususnya pengaruh politik Islam dan keprihatinan para ulama terhadap kondisi bangsa yang makin memprihatinkan. Maka para pemimpin Islam yang tergabung dalam Masyumi menginginkan dibentuknya suatu laskar perjuangan. Oleh karena itu, dibentuklah APS pada 23 Juli 1947 sebagai bentuk perjuangan militer Islam. Keterlibatan APS dalam mempertahankan kemerdekaan di bawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI) terlihat dari perjuangan mereka dalam berbagai pertempuran. Salah satu yang paling menonjol adalah peranan APS dalam Perang Kemerdekaan Indonesia II, pasukannya banyak yang dikirim ke medan pertempuran untuk membantu TNI menghadapi pasukan Belanda.

Kata Kunci: Askar Perang Sabil, Perang Kemerdekaan, Yogyakarta.

Abstract

The events of the War of Independence period 1945-1949 is historic for all Indonesian nation. Yogyakarta, which at that time became the capital of the country experienced the impact due to various threats both from abroad and from within the country itself. Many fighters are involved in maintaining independence in Yogyakarta. One of them is Askar Perang Sabil (APS) which is a semi-military organization founded by scholars aimed to assist the TNI in the face of Dutch troops. This study is aimed at describing and analyzing the APS movement, its role in various battles and examining the influence of Islamic politics on the establishment of APS and its role as a religious military force.

This study uses a critical historical method whose process involves certain stages according to the guidelines of historical discipline. First, heuristics is a search for resources to obtain relevant historical data. Second, source criticism, is the stage to determine the authenticity and credibility of the historical source obtained. Third, interpretation is the interpretation of historical facts or provide a theoretical view of an event. Fourth, historiography is the last stage of the activities of historical research is the presentation of research results in the form of writing history.

The results of this study indicate that Askar Perang Sabil (APS) is a semi-militarist organization formed to fight against the Dutch and other groups considered dangerous to the existence of the state. The formation of APS is inseparable from the influence of social and political conditions in Yogyakarta, especially the influence of Islamic politics and the concerns of the scholars on the condition of the nation that increasingly concerned. So the Islamic leaders who are members of Masyumi want the formation of a warrior of struggle. Therefore, APS was formed on July 23, 1947 as a form of Islamic military struggle. The involvement of the APS in maintaining independence under the command of the Indonesian National Army (TNI) is seen from their struggles in various battles. One of the most prominent is the role of APS in Dutch Military Aggression II, many of his troops are sent into battle to help the TNI face the Dutch troops.

Keywords: *Askar Perang Sabil, War of Independence, Yogyakarta.*

A. Pendahuluan

Kemerdekaan bangsa Indonesia terancam dengan adanya serangan dari bangsa lain. Hal ini mengundang keprihatinan dari berbagai lapisan masyarakat untuk ikut membela tanah air. Mengingat Indonesia adalah negara yang mayoritas agamanya adalah Islam maka ulama mempunyai peranan penting, paling tidak mampu menggerakkan umat dan rakyatnya tergabung dalam laskar-laskar rakyat yang penuh semangat melakukan perlawanan terhadap penjajah.¹ Ulama sebagai salah satu kekuatan sosial masyarakat yang dimiliki oleh Yogyakarta pada saat itu untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi memperjuangkan kemerdekaan bangsa, baik dilakukan dengan cara langsung maupun tidak langsung.

Adapun cara langsung dilakukan dengan membentuk laskar perjuangan rakyat berbasis islam yakni dengan didirikannya Hizbullah dan juga Askar Perang Sabil (APS) di Yogyakarta dan cara tidak langsung dengan melakukan pengajian dan berdo'a pada Allah SWT agar Indonesia diberikan kemerdekaan yang mutlak.² Berdirinya organisasi Muhammadiyah pada tanggal 12 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu contoh lahirnya Islam sebagai gerakan modernis oleh ulama Yogyakarta. Dalam perkembangannya, berdiri pula partai politik Islam Masyumi³ yang sebagian anggotanya adalah orang Muhammadiyah. Hal ini didorong oleh kondisi negara yang eksistensinya semakin terancam oleh serangan Belanda dan juga sekutu, karena hal itu timbul

¹Tashadi (dkk), *Keterlibatan Ulama DIY Pada Masa Perang Kemerdekaan Periode 1945-1949*, (Jakarta: Depdiknas, 2000), hlm.27.

²*Ibid.*

³Mayumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) merupakan partai politik Islam yang berdiri pada 7-8 November 1945 berawal dari sebuah kongres di gedung Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah, Yogyakarta, Suhatno, *Ki Bagus Hadikusumo: Hasil Karya dan Pengabdianannya*, (Yogyakarta: Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982-1983), hlm.40.

kesadaran dalam jiwa para ulama untuk bersatu mempertahankan kemerdekaan. Salah satunya dengan bergabung dalam satu wadah perjuangan politik Islam, untuk mengatur strategi dan menyusun kekuatan politik.⁴ Tetapi selain kekuatan politik, Indonesia pada saat itu juga memerlukan kekuatan militer yang tangguh.

Pada awal tahun 1946 Masyumi cabang Yogyakarta, mengusulkan pada pihak pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk mengizinkan terbentuknya organisasi semi militer guna membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam mempertahankan kemerdekaan. Bertepatan tanggal 17 Ramadhan 1367 H, diadakan musyawarah yang dipimpin oleh Ki Bagus Hadikusumo, diawali sholat *lail* dan *Itikaf* bermunajat kepada Allah SWT di masjid Taqwa suronatan Yogyakarta.

Hasil dari musyawarah tersebut akhirnya diputuskan untuk membentuk badan kelaskaran di bawah pimpinan para ulama dengan nama Angkatan Perang Sabil, namun kemudian diubah menjadi Askar Perang Sabil (APS) agar tidak terjadi kekacauan dalam bentuk kesatuan yang ada dalam TNI, karena di dalam menjalankan tugasnya APS selalu berada di bawah komando TNI. Kata Askar mempunyai persamaan makna dengan laskar yang bertujuan untuk melakukan perlawanan terhadap apapun yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan juga merupakan wadah perjuangan bagi pemuda-pemuda Islam di Yogyakarta, baik yang berasal dari pemuda-pemuda Islam bekas anggota Hizbullah⁵ maupun dari rakyat pada umumnya. Setelah musyawarah tersebut para ulama mengutus Ki Bagus Hadikusumo⁶, K.H Mahfudz Siraj dan

⁴ *Ibid*

⁵Hizbullah merupakan pasukan pejuang Islam dibentuk pada tanggal 14 September 1944 di Jakarta atas permohonan Masyumi kepada Jepang. Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*. (Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra, 1996), hlm.19.

⁶Ki Bagus Hadikusumo pada saat itu juga menjabat sebagai Ketua PP. Muhammadiyah. Djarnawi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perdjoengan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, (Yogyakarta: Persatuan, 1979), hlm. 39.

K.H. Ahmad Badawi untuk menyampaikan kebulatan tekad ulama Yogyakarta terhadap Sri Sultan Hamengku Buwono IX yang pada saat itu menjabat pula sebagai menteri pertahanan. Hal ini disambut baik oleh beliau dengan mengeluarkan surat persetujuan (Serat Kekantjingan) dan memberikan doa restunya, kemudian beliau menyuruh untuk menghadap Panglima Besar Jenderal Sudirman guna memberikan persetujuannya.

Ternyata beliau pun menyambut baik gagasan tersebut dengan senang hati dan akan memberi pelatihan kepada anggota Askar Perang Sabil. Setelah dibentuk pada tanggal 23 Juli 1947 secara resmi didirikan pula Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) yang merupakan wadah bagi organisasi pemimpinnya,⁷ maka sudah jelas bahwa APS bukan hanya sekedar kumpulan orang yang siap berperang di medan pertempuran, melainkan sebuah kelaskaran yang terorganisir dengan baik.

B. Situasi Sosial Politik Yogyakarta Masa Awal Kemerdekaan

Sebelum kemerdekaan, bentuk pemerintahan Yogyakarta adalah kerajaan terbagi ke dalam dua kekuasaan yakni Kasultanan Yogyakarta yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Pura Pakualaman yang diperintah oleh Paku Alam VIII. Setelah kemerdekaan sistem pemerintahan ini masih berlaku, karena Yogyakarta diberi kedudukan dengan status daerah istimewa dan kedua penguasa tersebut diakui oleh Presiden Republik Indonesia.

Sri Sultan maupun Paku Alam memiliki kekuasaan berdasarkan keturunan sekaligus mendapat kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia (RI)⁸. Menindaklanjuti kemerdekaan, setelah terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia beserta Komite Nasional

⁷*Ibid.*, hlm. 20.

⁸Suwarno, *Hamengku Buwono dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*, (Yogyakarta: Kanisius, 1994), hlm. 37.

Indonesia (KNIP)⁹ Pusat dua hari setelah Presiden Soekarno mengeluarkan maklumat pendirian KNIP maka di Yogyakarta pada tanggal 24 September 1945 dengan dukungan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan Paku Alam VIII segera diambil langkah-langkah pembentukan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID).¹⁰

Adapun susunan Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta sebagai berikut.¹¹

Ketua : Muhamad Saleh

Wakil Ketua : S.Yosodiningrat dan Ki Bagus Hadikusumo

Anggota : K.R.T Honggowongso, Marlan, H. Faried Ma'ruf, H. Hajid, Mr. Manu, Mr. Suryocokro, Wiyono, S.Parman, Sarjono, Ir. Dipokusumo, Jalaludin, Mr. S.Purwokusumo, Dr. Syamsudin, Murjodo, Umar Joyo, dan Dr. Sardjito.

Setelah terbentuknya KNID Yogyakarta maka Sri Sultan Hamengku Buwana mengeluarkan Amanat 5 September 1945. Di dalam amanat tersebut secara tegas menyatakan bahwa daerah Kasultanan Yogyakarta adalah bagian dari Republik Indonesia dengan kedudukan Daerah Istimewa. Kemudian keesokan harinya tanggal 6 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan Piagam Kedudukan Sri Sultan Hamengku Buwana IX dan di waktu bersamaan Presiden juga mengeluarkan Piagam Kedudukan untuk Sri Paduka Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Ario Paku Alam VIII.

Setelah dikeluarkannya amanat 5 September maka secara resmi Yogyakarta tidak lagi dikuasai oleh Jepang. Namun hal ini tidak diterima begitu saja oleh militer Jepang. Mereka dengan persenjataan yang lengkap masih ingin mempertahankan kekuasaannya di Yogyakarta. Hal ini dibuktikan dengan masih

⁹Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) merupakan komite yang sengaja dibentuk untuk membantu kinerja presiden. Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, (Jakarta: Serambi, 2005), hlm.430.

¹⁰Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, (Jakarta: Depdikbud, 1976), hlm. 282.

¹¹*Ibid.*

adanya pejabat Jepang yang menduduki pos-pos tertentu. Terjadi beberapa peristiwa pengambilalihan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang dapat dikuasai kembali oleh Indonesia. Berkat persatuan dan kesatuan pemerintah bersama rakyat Yogyakarta maka tentara Jepang berhasil dikalahkan. Kemenangan ini menandai DIY terlepas dari kekuasaan Jepang dan kekuasaan berada di tangan Kasultanan Yogyakarta serta Pak Pada awal tahun 1946 Belanda bersama Sekutu mengadakan penyerangan ke Jakarta. Pendudukan kembali Belanda atas Jakarta telah mengancam fungsi Jakarta sebagai ibukota negara. Dengan kondisi Jakarta yang semakin memburuk maka pada tanggal 04 Januari 1946 ibukota negara dipindahkan sementara ke Yogyakarta.

Adapun beberapa hal yang menjadikan Yogyakarta terpilih sebagai ibukota negara pada saat itu karena Yogyakarta dianggap sebagai wilayah yang paling maju. Hal ini dapat dilihat dari keberhasilan pemerintahan Hamengku Buwana IX pada awal tahun 1946 membuat beberapa undang-undang tentang memperbanyak jumlah orang yang berhak memilih dewan dan kepala desa serta menghapus pajak kepala. Beliau menjadikan Bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi, sehingga mengurangi pengaruh tingkat hierarki sosial Jawa di kalangan pejabat pemerintahan. Beliau juga membentuk laskar rakyat yang setia kepadanya. Selain itu, Sultan juga memainkan peranannya di bidang militer seperti para raja sebelumnya dan hal tersebut diakui oleh para panglima tentara Republik.¹² Namun pertimbangan mendasar adalah semangat perjuangan yang tinggi rakyat serta sikap tegas Sri Sultan Hamengku Buwana IX menjadikan Yogyakarta dinilai tepat dijadikan pusat pemerintahan dan ibukota Indonesia pada saat itu.

C. Terbentuknya Askar Perang Sabil dan Markas Ulama Askar Perang Sabil

Sri Sultan Hamengku Buwana IX mengeluarkan maklumat No.2 tanggal 12 Oktober 1945 yang berisi tentang ketentraman dan keamanan umum serta Maklumat No. 5 tanggal 26 Oktober 1945 tentang pembentukan Laskar Rakyat di Yogyakarta untuk membantu Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dalam

¹²Ricklefs, M.C, *op.cit.*, hlm.433.

mempertahankan kemerdekaan RI pada umumnya, serta DIY pada khususnya.¹³ Atas dasar maklumat tersebut serta dukungan dari para ulama (tokoh Islam) yang sebelumnya telah aktif dalam usaha melawan penjajah, maka secara sukarela rakyat Yogyakarta berbondong-bondong bergabung dengan laskar-laskar perjuangan di daerahnya masing-masing, tak terkecuali disambut baik oleh para tokoh Islam yang dengan rela berjuang di jalan Allah. Adapun beberapa organisasi kelaskaran yang lahir pada waktu itu antara lain, Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI) daerah “Mataram” yang pada perkembangannya berganti nama menjadi Tentara Rakyat Mataram (TRM).

Setelah terbentuknya TRM kemudian disusul dengan beberapa badan kelaskaran yaitu Laskar Segoroyoso dan Laskar Tirtonirmolo di Bantul, sedangkan di daerah Sleman tepatnya di Desa Brayut lahir Laskar Merah Putih. Kulonprogo, Adikarto, serta Wonosari Gunungkidul lahir laskar dengan nama Laskar Bambu Runcing.¹⁴ Hal ini mendorong keinginan dari para ulama untuk membentuk suatu badan perjuangan rakyat yang bernaftakan Islam, oleh karenanya dibentuklah Askar Perang Sabil dan Markas Ulama Askar Perang Sabil sebagai wadah perjuangannya sebagai bentuk *jihād fisabilillah*.

Askar Perang Sabil (APS) secara resmi didirikan pada tanggal 23 Juli 1947 bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1367 H. Merupakan organisasi semi militer muslim yang ikut berjuang dalam membela tanah air khususnya di Yogyakarta dan sengaja dibentuk oleh para ulama untuk membantu militer Indonesia melawan penjajah. Lahirnya APS tidak terlepas dari kondisi-kondisi umum yang melatarbelakanginya.

Ulama yang menginginkan dibentuknya Askar Perang Sabil merupakan mereka yang tergabung dalam organisasi Muhammadiyah bertempat tinggal di Kauman dan menyusun struktur kepengurusan pusat untuk menjalankan badan

¹³Tashadi, *op.cit.*, hlm.19.

¹⁴Estu Dwiyono, “Peranan Askar Perang Sabil (APS) Dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948”, *Skripsi* (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2012), hlm.27

perjuangan MUAPS di Yogyakarta. Adapun kepengurusan APS pusat adalah sebagai berikut:¹⁵

Penasehat	: Ki Bagus Hadikusumo
Imam	: K.H. Mahfudz Siradj
Ketua	: K.H.R. Hadjid
Wakil Ketua	: K.H.Ahmad Badawi
Bendahara	: K.H. Abdul Azis dan H. Hasyim
Komandan	: M. Sarbini
Wakil Komandan	: K.H. Juraimi
Penerangan	: Siradj Dahlan
Perlengkapan	: Abdul Djawad
Persenjataan	: M. Bakri Sudja
Logistik	: Bakri Syahid
Administrasi	: Daim ¹⁶

Kenggotan APS terdiri dari dua macam, pertama adalah anggota APS yang berasal dari mantan-mantan anggota Sabilillah yang usia mereka rata-rata sudah lebih dari empat puluh tahun. Mereka sebagai motor penggerak, membina mental serta kemiliteran. Kedua adalah anggota APS yang sebelumnya merupakan mantan anggota Hizbullah yang juga tidak masuk dalam TNI ditambah dengan para pemuda Islam yang telah berusia tujuh belas tahun keatas.

Keputusan dibentuknya APS dan MUAPS ini tidak akan terlaksana tanpa persetujuan dari Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX yang pada saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan untuk memohon do'a restu pembentukan Laskar Angkatan Perang Sabil seperti yang telah diputuskan sebelumnya. Kebijakan ini dilakukan oleh para petinggi APS dikarenakan perlu adanya pengesahan dari Menteri Pertahanan serta instansi terkait agar APS menjadi badan perjuangan yang resmi. Kemudian diutuslah tiga orang ulama untuk menghadap Sri Sultan di Kraton Yogyakarta, sekaligus mewakili ulama yang lainnya mereka adalah K.H. Mahfudz Siradj, K.H. Ahmad Badawi, dan Ki Bagus Hadikusumo.¹⁷ Pada saat itu

¹⁵ Tashadi, (dkk)., *op.cit.*, hlm. 57

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 58.

¹⁷ Ahmad Adabi Darban, *Sejarah Kauman* (Yogyakarta: Tarawang, 2000), hlm.67.

Sri Sultan berkenan memberikan restu atas dibentuknya Askar Perang Sabil mengeluarkan *Serat Kekancingan* yang mempergunakan bahasa Jawa.

Adapun terjemahan kedalam bahasa Indonesia serat kekancingan Sri Sultan Hamengku Buwono IX adalah sebagai berikut:

..Sudah menerima menghadap:Ki Bagus H. Hadikusumo, Kyai H. Mahfudz Siradj dan K.H. Ahmad Badawi sebagai wakil para ulama di Yogyakarta, yang menyampaikan permohonan para ulama di Yogyakarta setelah melaksanakan *i'tikaf* memohon kepada Allah SWT di masjid "Taqwa" kampung Suronatan Yogyakarta pada hari malam tanggal 17 bulan puasa tahun 1879 Jawa atau tanggal 23 bulan Juli tahun 1947...¹⁸

Adanya izin dari Sultan Hamengku Buwana IX maka badan perjuangan Askar Perang Sabil resmi terbentuk, setelah itu beliau memerintahkan untuk menghadap kepada Jenderal Sudirman selaku Panglima Besar untuk menerima izinnnya. Demikian pula beliau memberikan izin dibentuknya APS dan MUAPS. Lancarnya proses pembentukan laskar APS dikarenakan sejalan dengan adanya seruan dari Panglima Besar Jenderal Sudirman¹⁹ yang mengharapkan segenap lapisan masyarakat untuk ikut mempertahankan negara pada tanggal 21 Juli 1947.

D.Peranan Askar Perang Sabil Dalam Membantu TNI di Medan Pertempuran 1945-1949

Setelah badan perjuangan Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) dan angkatan bersenjata Askar Perang Sabil (APS) resmi dibentuk pada tanggal 23 Juli 1947 maka segera dilaksanakan pelatihan militer di halaman Masjid Besar Kauman dan di Alun-Alun Utara Yogyakarta. Pelatihan dilaksanakan dengan dibantu oleh pasukan TNI dan juga para mantan anggota Hizbullah yang

¹⁸Arsip Keraton, *Serat Kekantjingan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai bentuk restunya kepada para ulama yang telah membentuk MUAPS serta memberikan berkah atas terbentuknya Laskar Angkatan Perang Sabil.*

¹⁹Jenderal Sudirman merupakan Panglima Besar TKR yang kemudian disempurnakan menjadi TNI puncak karir beliau ketika perang gerilya Agresi Militer Belanda II tanggal 18 Desember 1948. Selain seorang Jenderal, Sudirman juga merupakan aktivis Muhammadiyah. Suwarno, *Relasi Muhammadiyah, Islam, dan Negara*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 53.

sebelumnya telah diberi pelatihan militer oleh Jepang di daerah Cibarosa, Bogor Jawa Barat. Adapun pelatihan militer yang diberikan meliputi latihan baris berbaris, latihan menembak, menyusun strategi perang dan lain sebagainya. Selama pelatihan tersebut berlangsung para ulama dan juga anggota MUAPS selain memberikan pelatihan fisik juga mengasah kerohanian kepada anggota APS.

Pada peristiwa Agresi Militer Belanda I Pengiriman pasukan APS pertama kali ke kota Semarang tepatnya ke daerah Mranggen dan Srandol. Badan perjuangan MUAPS mengirimkan satu kompi pasukan APS ke daerah Mranggen dengan komandan kompi K.H. Juraimi dengan didampingi KH. Hadjid sebagai imam. Selain ke Semarang, pasukan APS dikirim ke Kebumen hal tersebut dilakukan atas perintah Panglima Besar Jenderal Sudirman melalui surat perintah dari Jenderal Urip Sumohardjo. Selain karena perintah tersebut, APS juga diberi mandat oleh Sri Sultan Hamengku Buwana IX untuk bekerja sama dengan Angkatan Oemat Islam (AOI).²⁰

Setelah itu pada peristiwa pemberontakan PKI tahun 1948 APS terus berusaha untuk mengingatkan para anggota APS dan masyarakat muslim lainnya untuk mewaspadaai gerakan komunis yang terus berlangsung di tengah-tengah masyarakat.²¹ Pada operasi penumpasan komunis ini, salah satu pemimpin PKI meninggal bernama Istiajid.²² Adapun bentuk perjuangan APS dalam memberantas PKI di Madiun adalah dengan mengirimkan satu Bataliyon pasukan ke medan pertempuran pada bulan September 1948 di bawah pimpinan Bachron Edrees. Setelah itu MUAPS kembali mengirim satu kompi pasukan yang dipimpin

²⁰ Darto Harnoko, *Perang Kemerdekaan Kebumen*, (Yogyakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986), hlm. 34.

²¹Estu Dwiyono, *op.,cit*, hlm.85.

²²Nur'aini Setiawati, (1988), "Askar Perang Sabil: Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Republik Indonesia di DIY 1945-1949", *Skripsi*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1988) hlm. 74.

oleh M.Zaini menuju daerah kudu, disana mereka berhasil menggabungkan diri dengan kekuatan lainnya.

Ketika Belanda menyerang Yogyakarta, para ulama yang tergabung dalam MUAPS menyusun strategi pertempuran dan menyusun kekuatan untuk mengadakan perang gerilya. Adapun peranan APS sebagai organisasi semi militer dalam membantu TNI menghadapi pasukan Belanda ketika terjadinya Agresi Militer Belanda II di berbagai daerah Yogyakarta.

E. Kesimpulan

Peranan Masyumi dalam mempertahankan kemerdekaan tidak hanya sebagai sebuah partai namun juga memprakarsai berdirinya Askar Perang Sabil, hal ini berawal dari kondisi bangsa yang kian mengkhawatirkan maka timbul keprihatinan dari kaum ulama terutama mereka yang sebelumnya tergabung dalam organisasi politik Islam yang memiliki pengaruh dalam masyarakat muslim khususnya untuk ikut serta berjuang mempertahankan kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan membentuk organisasi semi militer Islam yang diberi nama Laskar Angkatan Perang Sabil pada tanggal 23 Juli 1947 di Masjid Taqwa yang berada di Kampung Suronatan Yogyakarta. Pada perkembangannya diganti namanya menjadi Askar Perang Sabil (APS) serta wadah perjuangannya diberi nama Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS).

Tujuan didirikannya APS untuk membantu Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam melawan musuh serta memiliki landasan perjuangan sesuai dengan ajaran Islam yang menyeru umat muslim untuk berjuang dijalan Allah dan karena adanya rasa nasionalisme (cinta tanah air). Keanggotaan APS adalah para pemuda muslim berusia 17 tahun ke atas yang telah diberikan izin oleh orang tuanya dan juga mantan anggota Hizbullah usia rata-ratanya di atas 40 tahun.

Berdirinya Markas Ulama Askar Perang Sabil (MUAPS) sebagai wadah yang mengkoordinasikan APS berisi para ulama merupakan badan yang sengaja dibentuk untuk membantu pemerintah Republik Indonesia dalam menghadapi serangan Belanda dan juga memberantas Partai Komunis Indonesia (PKI). Adapun anggota MUAPS terdiri atas kelompok bekas laskar Hizbullah dan laskar

Sabilillah serta kelompok pemuda kampung muslim menjadikan peranannya sebagai badan perjuangan yang menitikberatkan perjuangan dibidang militer yang bernafaskan Islam. Semangat *Jihad Fi Sabilillah* yang dimiliki oleh anggota APS dijadikan modal melawan musuh di medan pertempuran, disamping mengadakan pelatihan fisik yang dilakukan oleh mantan anggota Hizbullah dan pasukan TNI.

Keterlibatan APS dalam membantu TNI mempertahankan kemerdekaan masa Perang Kemerdekaan terlihat dalam berbagai pertempuran di berbagai daerah di Yogyakarta. Keberhasilan perjuangan APS berserta TNI dan badan perjuangan lainnya merupakan hasil dari kerjasama semua pihak. dan juga kegigihan pasukan APS dalam mempertahankan kemerdekaan serta tidak terlepas dari semangat *jihad fi sabilillah*.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip:

Arsip Keraton, *Serat Kekantjingan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX sebagai bentuk restunya kepada para ulama yang telah membentuk MUAPS dan izin melakukan itikaf munajat di masjid at-taqwa serta memintaberka atas terbentuknya Laskar Angkatan Perang Sabil.*

Arsip Museum Vredeburg, *berupa buku saku anggota Hizbullah milik K.H Hadjid,1944.*

Buku-Buku:

Ahmad Adaby Darban, *Sejarah Kauman: Menguak Identitas Kampung Muhammadiyah*, Yogyakarta: Tarawang, 2000.

Darto Harnoko, *Perang Kemerdekaan Kebumen*, (Yogyakarta: Depdikbud Direktorat Jenderal Kebudayaan Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, 1986), hlm. 34.

Djarnawi Hadikusumo, *Derita Seorang Pemimpin: Riwayat Hidup, Perjoeangan dan Buah Pikiran Ki Bagus Hadikusumo*, Yogyakarta: Persatuan, 1979.

Tashadi (dkk), *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991.

Ricklefs, M.C, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, Jakarta: Serambi, 2005.

Suhatno, *Ki Bagus Hadikusumo: Hasil Karya dan Pengabdiannya*, Yogyakarta: Manajemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1982-1983.

Suratmin, *Askar Perang Sabil Sebagai Kekuatan Sosio Religius dalam Masa Revolusi Fisik di Daerah Istimewa Yogyakarta 1945-1949*, Yogyakarta: Balai Kajian Jarahnitra, 1995.

Sutrisno Kutoyo, *Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1976.

Suwarno, *Hamengku Buwono dan Sistem Birokrasi Pemerintahan Yogyakarta 1942-1974: Sebuah Tinjauan Historis*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

_____, *Relasi Muhammadiyah, Islam dan Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.

Suyatno, *Badan-Badan Perjuangan*, Jakarta: Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Tradisi ABRI, 1998

Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah dalam Masyumi*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1997.

Skripsi:

Estu Dwiyono, "Peranan Askar Perang Sabil (APS) Dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan PKI di Kabupaten Gunungkidul Tahun 1948", *Skripsi*, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2012.

Nur'aini Setiawati, "Askar Perang Sabil: Studi Sosio Religius dalam Perjuangan Republik Indonesia, di DIY 1945-1949", *Skripsi*, Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, 1988.

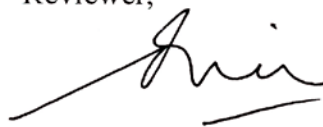
Pembimbing,



Drs. D. Umarwan
NIP. 19560101 198502 1 001

Yogyakarta, 24 Agustus 2017

Reviewer,



Dina Dwikurniarini, M.Hum.
NIP. 19571209 198702 2 001